Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 18 Nomor 2, Maret 2024: 119-190
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) adalah media ilmiah di bidang kebijakan hukum. Jurnal ini berisi kompilasi hasil penelitian dan kajian, kajian hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, JIKH ditetapkan memiliki Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Pembina	:	Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengarah	:	1. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pemimpin Umum/Redaksi (*Chief Editor*)	:	Dr. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
Pemimpin Umum/Redaksi (*Chief Editor*)	:	1. Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin) 2. Nizar Apriansyah, S.E., M.H. 3. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. (BRIN) 4. Edward James Sinaga, S.Si., M.H. 5. Haryono, S.Sos., M.H. 6. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H. (BRIN) 7. Trisapto Agung Nugroho, S.S., M.Si. (BRIN) 8. Imam Lukito, S.T., M.H.
Editor Pelaksana (*Managing Editor*)	:	Fitriyani, S.H., M.Si.
Asisten Editor (*Assisstant Editor*)	:	1. Lindung Budi Mulyawan, S.H. 2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. 3. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P. 4. Mira Sukmawati, S.I.P. 5. B. Lora Christyanti, S.I.P. 6. Amirah Balqis, S.H. 7. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasioanal)
Teknologi dan Sistem Informasi	:	1. Haddryson, S.H., M.H. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Andi Rarung, S.H., M.H. 4. Agus Priyatna, S.Kom. 5. Fadillah Said, S.Kom. 6. Harysandy Permana, S.Kom. 7. Adi Octaviantara, A.Md. 8. Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Kantor Redaksi:
Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Faks. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Peer Reviewer
atas kontribusi mereka dalam meninjau naskah untuk publikasi jurnal ini

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

2. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

3. Prof. Dr. lbnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

5. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Antoni Tsaputra, Ph.D.
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

7. Muhammad Ali Equatora, A.Ks., M.Si.
Politkenik Ilmu Pemasyarakatan

DAFTAR ISI

1. Optimalisasi Merek Kolektif di Kawasan Negara Serumpun dalam Kerangka *"ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation"*
(Optimization of Collective Trademark in Cognate Countries within The Framework of the "ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation") 103-118
Suryansyah

2. Menuju Pemasyarakatan yang Ramah Disabilitas: Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
(Towards A Disability-Friendly Correctional Facility: Implementation of Disability Service Unit Policy at The Correctional Implementation Unit) 119-138
Tony Yuri Rahmanto, Donny Michael, Yuliana Primawardani, Syafril Mallombassang, Anita Marianche

3. Menyoal Hak Konstitusional Narapidana Atas Tindakan Kekerasan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
(Questioning the Constitutional Rights of Prisoners to Violence by Correctional Officers in Indonesia) 139-154
Syahrial Yuska

4. A Legal Transplantation by The Rule of Law, Comparative Study, Legal Culture and History 155-172
Boy Nurdin

5. Evaluasi Pengaturan Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Aktif di Indonesia
(Evaluation of The Removal Regulation of Inactive Registered Trademarks in Indonesia) 173-190
Masfufah, Afifah Kusumadara, Yenny Eta Widyanti

Tajuk Rencana

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan JIKH edisi pertama pada bulan Maret 2024. Edisi kali ini menyajikan beberapa tulisan terkait isu kebijakan hukum dan hak asasi manusia.

Edisi kali ini memuat berbagai makalah yang membahas tentang Optimalisasi Merek Kolektif di Kawasan Negara Serumpun dalam Kerangka "*Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*"; Menuju Pemasyarakatan yang Ramah Disabilitas: Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; Menyoal Hak Konstitusional Narapidana Atas Tindakan Kekerasan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia; *A Legal Transplantation by The Rule of Law, Comparative Study, Legal Culture and History*; Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Aktif dalam Perspektif Teori Kesejahteraan Menurut Jeremy Bentham.

Diharapkan tulisan-tulisan ini dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal ini. Kami juga berterima kasih kepada para peninjau atas kontribusi mereka untuk meningkatkan kualitas setiap makalah. Kami juga menyambut ide dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas Jurnal.

Volume 18 Nomor 2, Juli 2024

p-ISSN: 1978-2292 (print)
e-ISSN: 2578-7425 (online)

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Optimization of Collective Trademark in Cognate Countries within The Framework of the "ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation"

Suryansyah

One of the strategic targets formulated in the ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation is the development of intellectual property in the region, with the initiative to explore the possibility of harmonization of formality requirements for trademarks. This article identifies the arrangements and efforts to optimize the utilization of collective trademarks in Indonesia and Malaysia as regional countries. This type of research is normative, using a statutory and comparative legal approach that analyzes data qualitatively. The results of this research reveal that collective trademark regulations in Indonesia require conditions in the form of a copy of a collective trademark use document, which contains provisions regarding the nature, general characteristics, quality of goods or services, supervision and sanctions for collective trademark users. Meanwhile, the regulation of collective marks in Malaysia is regulated in Article 72 of the Trade Marks Law 815 of 2019, which is indicated as a sign that differentiates the goods or services of an association from other companies. Efforts to optimize collective trademarks in cognate countries can be carried out through 2 (two) strategic approaches. First, it is necessary to harmonize collective trademark law regarding the formality requirements for their use in transnational relations. Second, through bilateral trade agreements, which can be in the form of contractual documents that technically regulate the use of collective trademarks. This article recommends that the Indonesian and Malaysian Governments develop a collective trademark together to create a more innovative region.

Keywords: *Collective Trademark; Cognate Countries; ASEAN Cooperation.*

Criminal Sanctions against the Offenders of Passive Vote Buying in the General Election Administration

Tony Yuri Rahmanto, Donny Michael, Yuliana Primawardani, Syafril Mallombassang, Anita Marianche

In fulfilling the rights of persons with disabilities in Correctional Institutions and Detention Centers, the Government established a Disability Service Unit. However, in fact, there is an obstacle that emerges, namely the availability of officers with the number of residents and infrastructure facilities that are not up to standard, causing the fulfillment of rights through the unit to be not optimal. This paper seeks to analyze the implementation of policies as well as strategies and recommendations for the service of persons with disabilities and the provision of appropriate accommodation in the Disability Service Unit in the Correctional Unit. This study uses a qualitative approach using the Ripley and Franklin policy implementation model. The results of the study show that the implementation of the disability service unit policy in Correctional Institutions and Detention Centers at the study location is not optimal because there are various problems such as the lack of medical personnel, the lack of competence of officers in dealing with people with certain types of disabilities, not all Correctional Institutions and Detention Houses have standard procedures for implementation, and so on. Therefore, there are three alternative policy options that can be carried out, namely first, increasing policy resource support. Second, coordination, communication and cooperation with other work units/ agencies/institutions in the implementation of ULD according to policy objectives. Third, monitoring and evaluation of the established policies. On the basis of the previous alternative, the author recommends choosing the first alternative policy strategy in overcoming various obstacles in its implementation.

Keywords: *Policy Implementatio; Disabled Correctional Inmates; Disability Service Unit; Appropriate Accommodation.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Questioning the Constitutional Rights of Prisoners to Violence by Correctional Officers in Indonesia

Syahrial Yuska

The occurrence of violence in prisons raises concerns of a return to the prison system of the past. Currently, the law has set limits on the actions of officers to prevent excessive force, use of violence and coercion. This research aims to provide an overview of violations of the constitutional rights of prisoners and their legal accountability. The research was conducted using a normative juridical approach involving the analysis of legal and conceptual regulations. The results show that the coaching approach involving violence is not always effective in solving the problem to its roots or providing a sustainable deterrent impact, instead creating persistent adverse impacts such as mental disorders, increased risk of depression in prisoners and hampering the effectiveness of rehabilitation programmes. Violence against prisoners by correctional officers is evidence of the non-fulfilment of the constitutional rights of prisoners as mandated by the Correctional Act that the treatment of prisoners who lose their freedom must be based on the principles of legal protection and respect for human rights based on Pancasila and the 1945 Constitution. Comprehensive reforms are needed in the correctional system to ensure that the constitutional rights of prisoners can be fulfilled. The researcher recommends that the government seeks supervision and strict action against.

Keywords: *constitutional rights; prisoners; violence.*

A Legal Transplantation by The Rule of Law, Comparative Study, Legal Culture and History

Boy Nurdin

Legal transplantation introduces foreign laws or institutions into a legal system without considering the existing legal culture, a process that poses significant challenges. When borrowing occurs through complete assimilation, these challenges are particularly evident. This research aims to develop a theoretical framework for legal transplantation through the lens of path dependence, a framework that can address the challenges that arise from the historical development of legal systems. To accomplish this aim, a systematic literature review (SLR) was conducted. This entailed the selection and analysis of articles published between 2019 and 2024 that focused on specific subjects, including legal transplantation practices, legal path dependence practices, and law creation from legal history. The articles were obtained from the Scopus database, which is a widely recognized global journal database. The results indicate that the development of a theoretical framework for legal transplantation by path dependence encompasses legal discussions and the rule of law by the judiciary in the home country, considering the challenges posed by recent cultural structures. The article elucidates the pivotal role of path dependence in legal system development through legal transplantation, while also underscoring its limitations and its manifestation in different countries.

Keywords: *Law; Legal Transplantation; Culture; History.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Evaluation of The Removal Regulation of Inactive Registered Trademarks in Indonesia

Masfufah, Afifah Kusumadara, Yenny Eta Widyanti

Trademarks play a vital role in modern trade, but in Indonesia, there is a normative conflict in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications between Article 74 Paragraph (1) and Article 35 Paragraph (1). How can a registered trademark be removed even though it is still within the protection period? The research method used is normative juridical with statutory, comparative, and case study approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed descriptively. This research aims to analyze whether the provisions for the removal of registered trademarks in Indonesia uphold the principles of justice and legal certainty by emphasizing Jeremy Bentham's welfare theory, in order to achieve appropriate regulations and harmonization between conflicting provisions. The results findings that the provision for removal registered trademarks are unfair and harmful to registered trademarks owners, as they disregard the principles of justice and legal certainty. Therefore, it is necessary to make a statement of the use of registered trademarks by the registered trademarks owner that is facilitated by the DJKI before the 10 year period so that there is harmonization between the conflicting provisions. The implementation of this solution is expected to provide legal certainty, encourage active use of trademarks, and support sustainable economic growth.

Keywords: *Inactive Registered Trademarks; Property Rights; Removal; Welfare.*

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Optimalisasi Merek Kolektif di Kawasan Negara Serumpun dalam Kerangka "ASEAN *Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*"

Suryansyah

Salah satu sasaran strategis yang dirumuskan dalam ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation yaitu pengembangan kekayaan intelektual di kawasan, dengan inisiatif mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi persyaratan formalitas untuk merek dagang. Tulisan ini mengidentifikasi pengaturan dan upaya optimalisasi pendayagunaan merek kolektif di Indonesia dan Malaysia sebagai kawasan negara serumpun. Jenis penelitian ini adalah normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum yang menganalisa data-data secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan merek kolektif di Indonesia mewajibkan syarat berupa dokumen salinan penggunaan merek kolektif yang memuat ketentuan mengenai sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa, pengawasan dan sanksi bagi pengguna merek kolektif. Sedangkan pengaturan merek kolektif di Malaysia diatur dalam pasal 72 Undang-undang Merek Dagang 815 Tahun 2019 yang mengindikasikan sebagai tanda yang membedakan barang atau jasa asosiasi dengan perusahaan lain. Dalam upaya optimalisasi merek kolektif di kawasan negara serumpun dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan strategis. Pertama, diperlukan harmonisasi hukum merek kolektif mengenai syarat formalitas penggunaanya dalam hubungan transnasional; Kedua, melalui perjanjian perdagangan secara bilateral yang dapat berupa dokumen kontrak yang mengatur secara teknis mengenai penggunaan merek kolektif. Tulisan ini merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia agar dapat mengembangkan merek kolektif secara bersama guna mewujudkan kawasan yang lebih inovatif.

Kata Kunci: Merek Kolektif; Negara Serumpun; Kerjasama ASEAN.

Menuju Pemasyarakatan yang Ramah Disabilitas: Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Tony Yuri Rahmanto, Donny Michael, Yuliana Primawardani, Syafril Mallombassang, Anita Marianche

Dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, Pemerintah membentuk Unit Layanan Disabilitas. Namun pada faktanya terdapat kendala yang mengemuka adalah ketersediaan petugas dengan jumlah penghuni dan sarana prasarana yang belum sesuai standar menyebabkan pemenuhan hak melalui unit tersebut belum optimal. Tulisan ini berupaya menganalisis pelaksanaan kebijakan serta strategi dan rekomendasi terhadap pelayanan penyandang disabilitas dan penyediaan akomodasi yang layak pada Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan unit layanan disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di lokasi kajian belum optimal dikarenakan terdapat berbagai permasalahan seperti minimnya jumlah tenaga medis, kurangnya kompetensi petugas dalam menangani penyandang disabilitas dengan jenis tertentu, belum semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan memiliki prosedur standar pelaksana, dan sebagainya. Oleh karenanya terdapat tiga alternatif pilihan kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama, peningkatan terhadap dukungan sumber daya kebijakan. Kedua, Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan ULD sesuai tujuan kebijakan. Ketiga, monitoring dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan. Atas dasar alternatif sebelumnya, maka penulis merekomendasikan untuk memilih alternatif strategi kebijakan pertama dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Warga Binaan Pemasyarakatan Disabilitas; Unit Layanan Disabilitas, Akomodasi yang Layak.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Menyoal Hak Konstitusional Narapidana Atas Tindakan Kekerasan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Syahrial Yuska

Terjadinya kekerasan di lembaga pemasyarakatan menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya sistem penjara masa lalu. Saat ini, undang-undang telah menetapkan batasan terhadap tindakan petugas untuk mencegah tindakan berlebihan, penggunaan kekerasan dan upaya paksa. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas pelanggaran hak konstitusonal warga binaan dan pertanggunjawaban hukumnya. Penelitian ini dikerjakan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang melibatkan tindakan kekerasan tidak selalu efektif dalam menyelesaikan masalah sampai ke akarnya atau memberikan dampak jera yang berkelanjutan, justru menciptakan dampak buruk yang terus-menerus seperti gangguan mental, peningkatan risiko depresi pada narapidana dan menghambat efektivitas program rehabilitasi. Kekerasan terhadap narapidana oleh petugas pemasyarakatan menjadi bukti tidak terpenuhinya hak-hak konsitusional narapidana sebagaimana amanat Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa perlakuan terhadap narapidana yang kehilangan kebebasannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Reformasi yang komprehensif diperlukan dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan hak-hak konstitusional narapidana dapat terpenuhi. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengupayakan pengawasan dan tindakan tegas terhadap petugas pemasyarakatan. Pengawasan ini memastikan bahwa petugas mematuhi undang-undang, etika profesi, serta hak-hak kemanusiaan dalam menjalankan tugas dengan integritas.

Kata Kunci: hak konstitusional; kekerasan; narapidana.

Evaluasi Pengaturan Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Aktif di Indonesia

Masfufah, Afifah Kusumadara, Yenny Eta Widyanti

Merek berperan vital dalam perdagangan modern, tetapi di Indonesia terdapat konflik norma dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara Pasal 74 Ayat (1) dengan Pasal 35 Ayat (1), bagaimana mungkin merek terdaftar dapat dihapuskan meskipun masih dalam masa perlindungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan studi kasus serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah ketentuan penghapusan merek terdaftar di Indonesia sudah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan menekankan pada teori kesejahteraan menurut Jeremy Bentham sehingga diperoleh pengaturan yang tepat dan terwujud harmonisasi di antara ketentuan yang berkonflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penghapusan merek terdaftar belum memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum sehingga tidak memberikan kebahagiaan bagi pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pernyataan penggunaan merek terdaftar oleh pemilik merek terdaftar yang difasilitasi oleh DJKI sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sehingga terdapat harmonisasi di antara ketentuan yang berkonflik. Implementasi solusi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mendorong penggunaan merek secara aktif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Milik; Kesejahteraan; Merek Terdaftar yang Tidak Aktif; Penghapusan.